



**UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM (S3)**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUН MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Politik Hukum & Kebijakan Publik	DH 0922	Humaniora	2	Ganjil	7 September 2023
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ka PRODI	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Dr.H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.					
Capalan		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK			
Pembelajaran Lulusan (CPL)		(S2) Menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			
		(S3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;			
Catatan:		(S4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
S : Sikap		(S7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
P : Pengetahuan		(S8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
KU : Keterampilan Umum		(S9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			
KK : Keterampilan Khusus		CPL2 (P1) Menguasai konsep teoretis dan prinsip hukum, serta dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat;			
		(P2) Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum;			
		(P4) Mampu menelaah dan menganalisis teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formal/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum;			
		(P6) Menguasai metode penelitian hukum, penalaran dan mampu melakukan penulisan hukum secara benar;			

CPL3	(KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
	(KU2)	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	(KU5)	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
CPL4	(KK2)	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
	(KK3)	Mampu melaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
	(KK5)	Mampu mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum dalam merancang peraturan dan kebijakan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK-1	Mampu memahami ruang lingkup, batasan dan definisi serta pengertian politik hukum dan kebijakan publik dalam rangka penyusunan beleid/policy/kebijakan tentang hukum di Indonesia yang dibutuhkan dan berdampak serta menjadi landasan bagi publik luas.
	CPMK-2	Mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan (politik) hukum dan sistem hukum di Indonesia dan memahami tentang penegakan hukum yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
	CPMK-3	Mampu memahami konsep dasar kebijakan publik dan menjelaskan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, dan proses kebijakan publik.
	CPMK-4	Mampu memahami dan mengetahui organisasi dan peran birokrat dalam kebijakan publik, serta aktor-aktor yang terlibat dan peran mereka dalam kebijakan publik.
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK 1	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan peristiwa dan arti dari politik hukum serta persinggungan ilmu politik dan ilmu hukum
	Sub-CPMK 2	Mampu memahami dan menjelaskan dua makna politik hukum dan tempat politik hukum
	Sub-CPMK 3	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan berbagai rumusan politik hukum dan implikasinya
	Sub-CPMK 4	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang konfigurasi politik dan karakter produk hukum
	Sub-CPMK 5	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan sistem hukum di dunia, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional
	Sub-CPMK 6	Mampu memahami dan menjelaskan tentang politik hukum pada penegakan hukum di Indonesia
	Sub-CPMK 7	Mampu memahami tentang independensi lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia
	Sub-CPMK 8	Mampu memahami dan menjelaskan defenisi dari kebijakan publik, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik

Sub-CPMK 9	Mampu memahami kebijakan publik dalam konteks manajemen dan kebijakan publik dalam konteks analisis
Sub-CPMK 10	Mampu memahami dan menjelaskan proses formulasi kebijakan publik
Sub-CPMK 11	Mampu memahami masalah monitoring kebijakan
Sub-CPMK 12	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori implementasi
Sub-CPMK 13	Mampu memahami, menjelaskan serta melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik
Sub-CPMK 14	Mampu memahami organisasi dan peran birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan

Koreksi CPMK terhadap Sub-CPMK

	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
CPMK1	✓	✓	✓	✓										
CPMK2							✓	✓						
CPMK3									✓	✓				
CPMK4											✓	✓	✓	✓

Politik Hukum mata kuliah yang mempelajari kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu/tujuan negara, dan Kebijakan Publik merupakan salah satu sub kajian dalam administrasi publik yang membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik di antaranya: ruang lingkup dan makna kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan dan proses kebijakan.

**Deskripsi Singkat
MK**

Mata kuliah ini akan membahas tentang :

1. Peristilahan dan arti politik hukum;
2. Dua makna politik hukum dan tempat politik serta berbagai rumusan politik hukum;
3. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum;
4. Sistem hukum dan the science tree of law ;
5. Politik hukum pada bidang penegakan hukum di Indonesia;
6. Definisi, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik;
7. Teori-teori kebijakan publik dan proses formulasi kebijakan publik;
8. Konsep dan teori implementasi;
9. Evaluasi dan perubahan kebijakan publik.

Bahan Kajian:

Materi pembelajaran

Pustaka	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daniel S. Lev, <i>Hukum dan Politik di Indonesia, Kesiambungan dan Perubahan</i>, Jakarta: LP3ES, 1990. 2. Sri Soemantri Martosowignjo, <i>Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Bandung: Alumni: 1992. 3. Moh. Mahfud MD, <i>Politik Hukum di Indonesia</i>, Jakarta: LP3ES, 1998 4. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, <i>Dasar-dasar Politik Hukum</i>, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004 5. Boy Nurdin, <i>Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia</i>. Bandung: Alumni, 2012. 6. John W. Kingdon, (2014), <i>Agendas, Alternative and Public Policies (2nd edition)</i>, Pearson Education Limited, England 7. Michael Hill. (2005), <i>The Public Policy Process (4th edition)</i>, England, Pearson Education Limited 8. Michael Hill and Peter Hupe. (2002), <i>Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice</i>, London, SAGE Publication <p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miriam Budiardjo, <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>, Jakarta: Gramedia, 1996 2. A.S.S. Tambunan, <i>Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945</i>, Jakarta: Puporis Publishers, 2002 3. Benny K. Harman, <i>Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman</i>, Jakarta: ELSAM, 1997. 4. Thomas A. Birkland, (2015). <i>A Introduction to the Policy Process (3rd edition)</i>. New York, Routledge 5. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). <i>The Policy Implementation Process: Administration & Society</i>, 6 (4), 445–488 6. William N. Dunn. (2018). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th edition)</i>. Routledge, New York. 7. Boy Nurdin, <i>Thinking Paradigm Of Judges For Law Enforcement In Indonesia: From Positivism To Realism</i>, Proceeding International LRPP 2017, Singapore https://github.com/DrBoyNurdin/Publikasi-Karya-Ilmiah/blob/main/Proceeding%20GSTF%202017_compressed.pdf 8. ———, <i>How Judges Use Their Thinking Paradigm To Find The Justice: Reviewing The Law Enforcement in Indonesia</i>, Book of Abstract Emavadev: International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation 2018, Kuala Lumpur-Malaysia https://github.com/DrBoyNurdin/Publikasi-Karya-Ilmiah/blob/main/ICMRI%202018.pdf 9. ———, <i>Law Enforcement in Indonesia: History, Progress and Public Trust</i>, Jurnal Internasional JSR Vol. 8 No. 2, 2019 https://www.iisr.net/getabstract.php?paperid=ART20195120
Dosen Pengampu	Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.
Matakuliah Syarat	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Kriteria & Bentuk	Indikator	Kriteria: Pedoman pokok-pokok bahasan (materi) dari mata kuliah politik hukum, istilah-istilah, tugas dan penilaian.	Bentuk : Non tes	Luring (5)	Daring (6)	
1	1 Mahasiswa mampu dan mengetahui serta menguraikan peristilahan dan arti dari politik hukum serta persinggungan ilmu politik dan ilmu hukum.	2	3	4	4	Luring (5)	Daring (6)	8
			Ketepatan menguraikan pokok-pokok bahasan (materi) dari mata kuliah politik hukum, istilah-istilah, tugas dan penilaian.	Kriteria: Pedoman - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	Bentuk : Non tes	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Kuliah: 1. Rule of game perkuliahan; 2. Materi ajar; 3. Pendahuluan perkuliahan 4. Istilah dan arti politik hukum; 5. Definisi ilmu hukum dan ilmu politik.	5%
2	2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dua makna politik hukum dan tempat politik hukum.	2	Ketepatan menguraikan makna dari politik hukum sebagai makna pertama dan kedua serta tempat politik hukum sebagai ilmu politik ataukah ilmu hukum.	Kriteria: Pedoman Penskoran - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	Bentuk : Non tes	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Kuliah: 1. Politik hukum dalam makna pertama; 2. Politik hukum dalam makna kedua; 3. Ilmu politik ataukah ilmu hukum.	5%
3	3 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan berbagai rumusan politik hukum dan implikasinya.	3	Kejelasan dalam memahami berbagai pendapat dari para ahli hukum mengenai politik hukum dan mampu menafsirkannya.	Kriteria: Pedoman penskoran - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	Bentuk : Non tes	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Kuliah: 1. Padmo Wahyono 2. Teuku Moh. Radhie 3. Soedarto 4. Mahfud MD 5. Sri Soemantri 6. Daniel S. Lev	5%
4	4 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang konfigurasi politik dan karakter produk hukum.	4	Ketepatan menguraikan hukum sebagai produk politik, dan politik sebagai kebijakan (beleid, policy) serta memahami variabel-variabel independent dan dependent antara konfigurasi politik dan konfigurasi politik dan karakter produk	Kriteria: Pedoman penskoran - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	Bentuk : Non tes	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Kuliah: 1. Hukum (tertulis) sebagai produk politik; 2. Politik sebagai kebijakan (beleid, policy); 3. Variabel independent dan variabel dependent (antara konfigurasi politik dan karakter produk	5%

	karakter produk hukum.				hukum.
5	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan serta menguraikan sistem hukum di dunia, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional.	Ketepatan memahami ilmu hukum dan the science tree of law serta dapat menjelaskan mengenai sistem-sistem hukum.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	1. Ilmu hukum dan the science tree of law; 2. Sistem hukum di dunia; 3. Sistem hukum di Indonesia; 4. Sistem hukum nasional. 5%
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang politik hukum pada penegakan hukum di Indonesia.	Ketepatan menguraikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia dan memahami siapakah sebenarnya penegak hukum itu.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	1. Faktor-faktor fundamentalis yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia; 2. Apa dan siapa sebenarnya penegak hukum? 5%
7	Mahasiswa mampu memahami tentang independensi lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dari rezim ke rezim.	Ketepatan dan kejelasan tentang independensi lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dari rezim ke rezim.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Dikususi (PB: 1 x (2x50''))	1. Rezim Orde lama (1959-1967); 2. Rezim Orde baru (1968-1998); 3. Rezim Pasca Orde Baru (1998-sekarang). 5%
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya				
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dari kebijakan publik, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik.	Ketepatan dan kejelasan memahami konsep dan teori dasar kebijakan publik, mencakup makna, konsep dan ruang lingkup.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Dikususi - Quiz (PB: 1 x (2x50''))	Konsep dan teori dasar kebijakan publik: 1. Makna-makna; 2. Konsep-konsep, karakter dan ruang lingkup. 5%

10	Mahasiswa dapat memahami kebijakan publik dalam konteks manajemen dan kebijakan publik dalam konteks analisis.	Ketepatan menguraikan tentang kebijakan publik sebagai manajemen atau sebagai kebijakan publik sebagai analis kebijakan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusı (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Konteks Kebijakan Publik: 1. Kebijakan publik sebagai manajemen atau sebagai proses kebijakan; 2. Kebijakan Publik sebagai analisis kebijakan.	5%
11	Mahasiswa mampu memahami dan memahami dan menjelaskan proses formulasi kebijakan publik.	Kejelasan memahami isu-isu dan aktor-aktor dalam formulasi kebijakan dan dapat mendeskripsikan model-model formulasi kebijakan	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusı (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Formulasi kebijakan publik: 1. Isu-isu dan aktor-aktor dalam formulasi kebijakan; 2. Deskripsi dan analisis model-model formulasi kebijakan.	5%
12	Mahasiswa mampu memahami masalah monitoring kebijakan.	Ketepatan menguraikan konsep dasar monitoring, jenis dan pendekatan monitoring kebijakan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusı (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Konsep dasar monitoring kebijakan; 2. Jenis dan pendekatan monitoring kebijakan.	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori implementasi.	Ketepatan menguraikan konseptualisasi implementasi kebijakan, prosesnya dan model-model implementasi kebijakan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusı (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Konseptualisasi implementasi kebijakan; 2. Proses implementasi kebijakan; 3. Model-model implementasi kebijakan.	5%
14	Mahasiswa mampu memahami dan memahami dan menjelaskan serta melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik.	Ketepatan dalam menguraikan konsep-konsep dan langkah-langkah evaluasi, pendekatan, metode, perubahan dan penghentian kebijakan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusı - Seminar Kelas (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Konsep-konsep dan langkah-langkah evaluasi kebijakan; 2. Pendekatan dan metode evaluasi kebijakan; 3. Perubahan dan penghentian kebijakan.	5%

15	Mahasiswa dapat memahami organisasi dan peran birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan.	Ketepatan dalam menjelaskan tentang organisasi dalam implementasi kebijakan dan peran birokrat sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk : Non tes	Kuliah: - Ceramah - Dikususi - Seminar Kelas (PB: 1 x (2x50''))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Organisasi dalam implementasi kebijakan; 2. Peran birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan.	5%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penggunaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebarkan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebarkan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-buktii.
6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=tatap muka, PT=perugasan terstruktur, BM=belajar mandiri